

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN  
MANDI PADA PENGANTIN  
(STUDI DI KARTARAHARJA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

**Skripsi**

**Nama: Arma Azizka**

**NPM: 1721010013**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN  
MANDI PADA PENGANTIN  
(STUDI DI KARTARAHARJA KECAMATAN TULANG BAWANG  
UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Hukum**

**Oleh**

**Arma Azizka**

**NPM: 1721010013**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I: Prof.Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi pada Pengantin, peristiwa ini mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana Masyarakat setempat mempercayai sebuah tradisi pelarangan mandi terhadap pengantin guna untuk memperlancar prosesi acara dan kepercayaan agar tidak turunya hujan saat acara berlangsung sementara yang kita ketahui adat istiadat Indonesia pada umumnya terdapat prosesi khusus dalam pernikahan yang menganjurkan pengantinnya untuk mandi, tujuan penelitian ini akan menggali konsep pelarangan mandi pada tradisi tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dalam koridor hukum Islam, Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi larangan mandi pada Pengantin di Kampung Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Mandi pada pengantin, sementara tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap larangan mandi pada Pengantin di Kampung Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan mandi pada pengantin pada masyarakat desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelarangan mandi bagi pengantin yang menuai kepercayaan mencegah turunya hujan, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena adat Istiadat tersebut. dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri, Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang Larangan Mandi pada Pengantin dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial.

Penelitian ini langsung mengamati Masyarakat pada Desa Kartaraharja Kabupaten Tulang Bawang Barat, hasil dari penelitian ini adalah Tradisi Larangan mandi pada pengantin merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat suku Lampung desa Kartarahaja Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Tradisi Warisan Budaya suku Lampung, sehingga sebagai warisan budaya dari leluhur sudah menjadi keharusan bagi masyarakat Suku Lampung untuk menjalankanya dan melestarikanya agar dapat dikenal oleh anak keturunan kelak dan Pelaksanaan Tradisi ini tidak terdapat pengurangan syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan dalam pelaksanaanya Mayoritas Masyarakat mempercayai bahwasanya hal yang terjadi setelah pelaksanaan tradisi tersebut seperti tidak turunya hujan pada saat resepsi dan lancarnya acara pada hari H adalah murni kehendap Allah SWT sebagai dzat yang maha kuasa.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arma Azizka

NPM : 1721010013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 April 2021

Penulis,



Arma Azizka

NPM. 172101001





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Arma Azizka  
NPM : 1721010013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada  
Skripsi : Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas  
Syariah UIN Rarden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Mohi. Mukri, M.Ag**  
**NIP. 195904161987031002**

**Pembimbing II**

**Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Program Studi**

**H. Rohmat, S.Ag., M.HI.**  
**NIP. 19740920200312100**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) disusun oleh Arma Azizka, NPM 1721010013, Program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal:

**Tim Penguji**

Ketua : Dr.Abdul Qodir Zaelani,S.H.I, M.A

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad,M.H

Penguji I : Marwin, M.H

Penguji II : Prof.Dr.H.Moh. Mukri,M.Ag

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.Si



## MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki”  
(Ar-rum 30:21)*



## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dan ikhtiar untuk menyelesaikan tugas akhir. Atas ridho Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kusayangi dan cintai serta ku hormati dan terima kasih kepada:

1. Ayahku tercinta Abu Rahman dan Umiku tercinta Sunlina Baiti terima kasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluhan kesahku, memberikan semangat dan do'a disetiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Adik-adikku Dinari Nurrahman, Dzakiyah Maharani, dan Puji terima kasih atas do'a dan semangat serta dukungan yang selalu mengiringi langkahku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Arma Azizka dilahirkan di Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 Desember 2000, anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Abu Rahman dan Sunlina Baiti.

Berikut pendidikan berawal pada:

1. TK Raudatul Hidayah pada tahun 2004 selesai pada tahun 2005.
2. SDN 03 Kartaraharja pada tahun 2005 selesai pada tahun 2011.
3. SMPN 01 Tulang Bawang Udik pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014.
4. SMAN 01 Tumijajar pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Al- Ahwalus Syakhsiyyah ) Fakultas syariah pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

Bandar Lampung, 16 Maret 2021  
Yang menyatakan,

**Arma Azizka**  
**NPM. 1721010013**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada Pengantin”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan yang semata mata karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, Rektor UIN Raden Intan Lampung Dan Sekaligus Pembimbing 1.
2. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. Pembimbing II Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan membantu serta memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan tanggapan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Bapak Dr. H. A. kumedi Ja'far, S. Ag., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
7. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.Ketua Program Studi Al- Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temanku tersayang Cahya, anes, getta, era, eka, dian arfi, danti, mia, wulan,adai, nova, jeje, teranggi, feri, ella, lita, ica, serta keluarga Al-Ahwalus Syakhsiyyah D yang memberi dukungan, motivasi, dan do'anya. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah luasnya wawasan kita.

Bandar Lampung, 16 Maret 2020

Penulis,

**Arma Azizka**  
**NPM. 1721010013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	26
3. Tujuan Perkawinan .....	31
4. Syarat- Syarat Perkawinan.....	36
5. Rukun Perkawinan.....	37
B. Klasifikasi Mandi dalam Islam .....	42
1. Pengertian Mandi.....	42
2. Syarat sah Mandi .....	44
3. Rukun Mandi .....	45
4. Macam- Macam Mandi .....	46
5. Tata Cara Mandi .....	49
6. Manfaat Mandi .....	50
C. <i>Al- Urf'</i> Dalam Konsep Islam .....	51
1. Pengertian <i>Al-Urf'</i> .....	51
2. Dasar Hukum <i>Al-Urf'</i> .....	55
3. Syarat- Syarat <i>Al- Urf'</i> .....	57
4. Macam- Macam <i>Al- Urf'</i> .....	59



<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Tentang Larangan Mandi Pengantin .....	62
B. Pelaksanaan Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin di Wilayah setempat.....	66
C. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Setempat.....	67
<b>BAB IV ANALISA DATA.....</b>	<b>72</b>
A. Prespektif Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Mandi Pengantin di Kartaraharja .....	72
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi Pengantin .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTRIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**KARTU KONSULTASI**

Nama : Arma Azizka  
NPM : 1721010013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

No	Tgl Konsultasi	Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1	19 November 2020	Konsultasi Proposal Seminar (Perbaikan penulisan daftar pustaka) Dengan Pembimbing II		
2	29 Agustus 2020	ACC Proposal dengan Pembimbing II		
3	24 September 2020	Seminar Proposal		
4.	10 November 2020	Konsultasi Proposal setelah seminar dengan pembimbing II (Revisi Metode Penelitian)		
5.	12 November 2020	ACC Proposal Lanjut Bab I-V dengan pembimbing II		
6.	12 November	Bimbingan Proposal dengan pembimbing I		

	2020	(Revisi rencana outline dan penulisan)		
7.	13 November 2020	ACC Proposal Lanjut Bab I-V dengan Pembimbing I		
8.	22 Maret 2021	Bimbingan skripsi (perbaikan cover, kata pengantar, persembahan, dan table nya diberi sumber) dengan pembimbing II		
9.	23 Maret 2021	Bimbingan Skripsi (abstrak 1 spasi dan dijadikan 1 halaman) dengan pembimbing II		
10.	29 Maret 2021	ACC Skripsi dengan pembimbing II		
11.	31 Maret 2021	Bimbingan skripsi (perbaikan sistematika penulisan dan menambahkan nama informen)		
12.	05 April 2021	ACC Skripsi dengan pembimbing I		

Mengetahui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**  
NIP. 195904161987031002

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
NIP. 197304142000032002



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti serta makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya makna ganda terhadap judul. di samping itu langkah ini merupakan pokok fokus terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**.

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketentuan langsung maupun tidak langsung yang di lihat dari kaca mata agama Islam.<sup>1</sup>
2. Tradisi adalah merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun-menurun<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

3. Larangan menurut KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu dan tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu.<sup>3</sup>
4. Mandi adalah sarana untuk membersihkan badan yang dilakukan setiap hari yang bertujuan untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan dengan cara mengalirkan air ke sekujur tubuh dengan niat.<sup>4</sup>
5. Pengantin menurut KBBI adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana Pandangan Islam terhadap budaya atau *Al-urf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bagaimana pandangan Masyarakat setempat menyikapi fenomena tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan akad nikah atau tazwij.<sup>6</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan juga perempuan serta saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.1050

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012),h.34

<sup>5</sup> Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.1350

<sup>6</sup> Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka setia,200),h.12

Wujud *sunatullah* yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasangannya yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Mandi pengantin merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh banyak suku di Indonesia dengan nama yang berbeda seperti: Siraman (Jawa), Badudus (Banjar), dan lainnya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa yang beragam, memiliki berbagai tradisi yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu yang melestarikan tradisi mandi pengantin, di sisi lain terdapat perbedaan tradisi pada Masyarakat suku Lampung yang mana terdapat pelarangan mandi untuk pengantin yang bertujuan untuk memperlancar jalannya acara resepsi dan di percayai agar tidak turunnya hujan selama prosesi acara berlangsung.

Tradisi merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun-menurun. Kata Tradisi memiliki makna yaitu: Pertama, adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; dan Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>8</sup> undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

Tradisi adalah sebagai wujud sistem sosial yang bersifat nyata dan dapat diamati berupa kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Di Indonesia terdapat sekitar 250 etnis/suku, seperti di Nanggroe Aceh Darussalam yakni Aceh, Alas, Gayo, dll; di Sumatra Utara yakni Karo, Nisa, Simalungun, dll; di Sumatra Barat yaitu Minangkabau, Mentawai, Melayu, dll; di Riau yakni Melayu, Siak, Rokan, dll; di Kepulauan Riau dan Bangka Belitung yakni Melayu, di Jambi yaitu Batin, Kerinci, Penghulu, dll; di Sumatra Selatan yakni Palembang, Melayu, Ogan, dll, di Bengkulu yakni Melayu, Rejang, Lebong, dll; di Lampung yakni Lampung, Melayu, Semendo, dll; di DKI Jakarta yakni Betawi; di Banten yakni Banten; di Jawa Barat yakni Sunda dan Badui, di Jawa Tengah yakni Jawa, Karimun, Samin, dan Kangean; di D.I. Yogyakarta yakni Jawa; di Jawa Timur yakni Jawa, Madura, Tengger, Osing, di Bali yakni Bali, Jawa, dan Madura, di Nusa Tenggara Barat yakni Bali, Sasak, Bima, dll; di Nusa Tenggara Timur yakni Alor, Solor, Rote, dll; di Kalimantan Barat yakni Melayu dan Dayak (Iban Embaluh, Punan, dll); di Kalimantan Tengah yakni Melayu, Dayak (Medang, Basap, dll), Banjar, dll; di Kalimantan Timur yakni Melayu dan Dayak (Bukupai, Lawangan, dll); di Kalimantan Selatan yakni Melayu, Banjar, dan Dayak dan Aba; di Sulawesi Selatan yakni Bugis, Makasar, Toraja, dan Mandar, di Sulawesi Tenggara yakni Muna, Buton, Toraja. di Sulawesi Tengah yakni Kaili, Tomini, Toli-

---

<sup>10</sup> Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016 (Jakarta: Kemdikbud RI, 2016), h.12.



Toli, dll. di Sulawesi Utara yakni Bolaang- Mongondow, Minahasa, Sangir, dll; di Gorontalo yakni Gorontalo, di Maluku yakni Ambon, Kei, Tanimbar, dll, di Maluku Utara yakni Ternate, Morotai, di Papua Barat yakni Waigeo, Misool, Salawati, dll; di Papua Tengah yakni Yapen, Biak, Mamika, Numfoor; hingga di Papua Timur yakni Sentani, Asmat, Dani, dan Senggi.<sup>11</sup>

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi pada Pengantin, peristiwa ini mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang bawang barat yang mana Masyarakat setempat mempercayai sebuah tradisi pelarangan mandi terhadap pengantin guna untuk memperlancar prosesi acara dan kepercayaan agar tidak turunya hujan saat acara berlangsung sementara yang kita ketahui adat istiadat Indonesia pada umumnya terdapat prosesi khusus dalam pernikahan yang menganjurkan pengantinya untuk mandi, tujuan penelitian ini akan menggali konsep pelarangan mandi pada tradisi tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dalam koridor hukum Islam, sebagaimana yang di jelaskan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-baqarah : 170 yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِ آبَاءَنَا  
أُولَٰئِكَ كَانُوا ءِ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: dan apabila dikatakan kepada mereka “ikutilah apa yang diperintahkan Allah, mereka menjawab “tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami”. “apakah mereka akan

<sup>11</sup> Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016 (Jakarta: Kemdikbud RI, 2016), h. 26-28

*mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?*<sup>12</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwasanya antara kebudayaan dan tradisi masyarakat (*Al-Urf*) tidaklah boleh berbenturan dengan norma dan koridor hukum Islam yang berlaku terlebih mempercayai sesuatu selain dari kehendak Allah SWT seperti bertujuan untuk menghentikan curah hujan yang akan turun yang merujuk pada perbuatan *Syirik Ashgor*.

Perkara yang menunjukkan bahwa syirik kecil adalah sebuah dosa yang sangat besar menurut pendapat sebagian ulama, yaitu pelaku syirik kecil tidak bisa diampuni jika ia mati dan tidak bertaubat darinya, mengalahkan timbangan amal buruknya namun ia tidak kekal di neraka. Karena sebagian ulama mengklasifikasikan dosa Syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu di adakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi pada Pengantin apakah sesuai dengan koridor hukum Islam ataukah tidak. Maka penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi yakni “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)” diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan kerangka acuan dan parameter bagi Masyarakat dalam menyikapi sebuah Tradisi yang berkembang.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.23

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin (Studi di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

Fokus Penelitian tersebut kemudian akan di jabarkan menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti :

1. Tokoh masyarakat kartaraharja kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Tokoh adat Kartaraharja kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Tokoh Agama Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi larangan mandi pada pengantin di kampung Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan mandi pada pengantin di kampung Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

## **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap larangan mandi pada pengantin di kampung Kartaraharja kecamatan Tulang Bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap larangan mandi pada pengantin di kampung Karta Raharja kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini di harapkan akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Mandi pada Pengantin Studi Kasus Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam kosentrasi hukum Islam yang di harapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke islamana pada umumnya di kalangan masyzarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep *Al-Urf* sesuai dengan Syariat Islam yang berdasarkan Al- Quran dan hadist, Selain itu juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan di laksanakan guna untuk



memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmunan Indonesia secara luas.

2. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti mencoba menyertakan berbagai *literatur* dan penelitian terlebih dahulu dilakukan yang masih relevan terhadap obyek penelitian saat ini, selain itu Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan Penelitian yang dilakukan Penulis bukanlah *Plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain tujuannya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini.

Hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan* (Studi Desa Tulung Agung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) oleh Lia Mufidatul Musarofah (2017), penelitian ini tergolong dengan penelitian lapangan atau *Field Research* yang bersifat Kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah informasi dari para narasumber,

dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adat-adat yang mengiris perkawinan adat tersebut sudah sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga sekarang. Mereka meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari nilai-nilai adat tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya. Namun, dalam pandangan Islam Hukum Islam yaitu berdasarkan *'Urf*, kebiasaan pasang *sesajen* dan juga melakukan ruwatan ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf Fasid* karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk ghaib yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain Allah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum.<sup>13</sup>

Penelitian diatas dengan Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin yang peneliti teliti memiliki perbedaan yang terletak pada obyek penelitian yaitu antara tradisi sesaji dan tradisi larangan mandi pada pengantin serta perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian diberlangsungkan dan hasil dari penelitian, bahwasanya tradisi sesaji dan ruwatan ialah *'Urf' Fasid* karena pengamalannya ditujukan pada roh gaib, hal ini berbeda dengan hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Lia Mufidatul Musarofah, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan*". (Skripsi program sarjana IAIN Ponorogo 2017),h.65

Tradisi Larangan Mandi pada Pengantin karena pengamalanya ditujukan untuk Allah SWT.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo oleh Sofyan Aziz Yammani (2019) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara mendalam untuk data primer dan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalan yang notabenenya lingkungan agamis merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh pendahulu atau nenek moyang masyarakat setempat. Tujuan utamanya untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalan sendiri dan menghormati nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur. Tradisi perkawinan adat jawa yang berlaku di dusun Cikalan yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena beberapa pertimbangan, misalnya perekonomian yang dapat dikatakan berada di kelas bawah. Oleh karenanya bagi sebagian masyarakat yang mampu menjalankan

tradisi perkawinan ini merupakan sebuah upaya untuk tetap melestarikannya.<sup>14</sup>

Penelitian yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian ini, penulis pada penelitian ini mencoba mengkombinasikan pokok bahasan yang sebelumnya telah digunakan yakni di antaranya adalah perkawinan dan adat kemudian penulis spesifikasikan pokok bahasan pada Pelarangan Mandi pada Pengantin yang merupakan tradisi suatu perkawinan suku Lampung. Namun perbedaan mendasar terletak pada keberlangsungan tradisi dimana pada Tradisi pelarangan mandipada penganti tradisi masih berlangsung di kehidupan masyarakat namun pada penelitian yang telah diuraikan diatas adat sudah mulai ditingkalkan karena beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi.

3. Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan oleh Lutfiyah (2014)  
Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke

---

<sup>14</sup> Sofyan Aziz Yammani, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa*”.(Skripsi program sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019),h.78

tanah Jawa. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita, yang memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofi yang mendalam dan luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang ada pada upacara pernikahan adat Jawa mengandung makna-makna yang baik selama tidak menyalahi aturan agama.<sup>15</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang adat dalam pernikahan suku Jawa yang erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu, namun telah mengalami perkembangan sejak agama-agama mulai masuk ke Indonesia adat yang diteliti adalah secara general dan tidak spesifik hal ini berbeda pada judul skripsi ini yakni “Tradisi Pelarangan Mandi pada Pengantin” yang meneliti tentang masyarakat adat Lampung dan Objek Penelitian Spesifik tentang Pelarangan Mandi guna lancarnya prosesi resepsi.

## **I. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis

---

<sup>15</sup> Lutfiyah. "Relasi Budaya dan Agama". Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, h.12

<sup>16</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasido, 2008), h. 2-3.



memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang sesuai dengan *Syariat* Islam dengan objek penelitian di Desa Kartaraharja Kabupaten Tulang Bawang Barat.

# 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

## a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelarangan mandi bagi pengantin yang menuai kepercayaan mencegah turunya hujan, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena adat Istiadat tersebut. dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.<sup>17</sup>

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang Larangan Mandi pada Pengantin dan menuangkanya dalam proses atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati Masyarakat pada Desa Kartaraharja Kabupaten Tulang Bawang Barat.

---

<sup>17</sup>Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.18

## b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.<sup>19</sup> Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi fenomena Larangan Mandi Pada Pengantin yang menjadi permasalahan pada masa kini apakah hal ini sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.<sup>20</sup> dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebuu dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya

---

<sup>18</sup>Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47

<sup>19</sup>Nufian S Febriani,*Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*,(Jakarta: Tim Ub Press,2018), h.49

<sup>20</sup>*Ibid*,h.105

adalah data yang asli dengan demikian Data sekunder dapat di peroleh dari buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.<sup>21</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>22</sup> Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu :

#### a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>23</sup>

#### b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>24</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini

---

<sup>21</sup>Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), h. 105.

<sup>22</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gafindo, 2002), h. 155.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 234.

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 243

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report* atau setidak- tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup>

4. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan di gali dari seseorang tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak di teliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut.

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:<sup>26</sup>

- a. Informan Kunci (*Informan Key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
- c. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, Penelitian ini Narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h.188.

<sup>26</sup> Begong suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, ( Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005), h.172

## 5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>27</sup> Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Mandi pada Pengantin.

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Mandi pada Pengantin yang akan di kaji dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum Islam menyikapi Larangan Mandi pada Pengantin ini apakah sesuai dengan koridor *Syariat* Islam. Tujuanya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif. Metode deduktif-induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-kaidah

---

<sup>27</sup>Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),23



yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Larangan Mandi pada Pengantin pada konsep Hukum Islam. Hasil penelitian akan di tuangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **J. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang di tuangkan pada landasan teori.

### **3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab yakni :

- a. Gambaran umum objek penelitian
- b. Penyajian Fakta dan data penelitian

### **4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Pada Bab ini Analisis Penelitian berisikan :

---

<sup>28</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36

- a. Analisis data Penelitian
- b. Temuan Penelitian

## **5. BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan di dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama yakni biasa disebut dengan “Nikah”, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua nya untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman jiwa dengan cita *sakinah, mawaddah warahmah* dengan cara-cara yang diridhai dan di berkahi oleh Allah SWT.<sup>29</sup>

Perkawinan akan dilakukan setelah masing-masing pasangan merasa siap melakukan tugasnya yang positif dalam mewujudkan dan membentuk tujuan baik dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia dalam berkehidupan . Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan

---

<sup>29</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989),h.9

menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>30</sup>

### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>31</sup>

Akad Nikah tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.<sup>32</sup> Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang *pertama* adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu

---

<sup>30</sup> Slamet Dam Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.298

<sup>31</sup> *Ibid*.h.10

<sup>32</sup> Nawawi, Nibayah Al Zayn, h.298.

dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). *Kedua*, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. *Ketiga*, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).<sup>33</sup>

Perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>34</sup> Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian

<sup>33</sup>Zayn Al-din, Fathul Mu'in, h.298.

<sup>34</sup>Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.1-2.



seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>35</sup>

Sementara, jika melihat dari segi hukum positif pengertian perkawinan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),406

1974 tentang perkawinan, yang memuat isi pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorsng wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Uraian pengertian dalam pasal 1 tersebut dalam penjelasaknya disebutkan bahwa, “ sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertama ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja meliputi unsur jasmani dan rohani tetapu pula unsur batin dan rohani yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Ikatan lahir dan batin dalam perkawinan adalah pertalian jiwa yang terjalin karena adanya keinginan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai sepasang suami dan isteri, dalam tahap pemulian ikatan lahir dan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>37</sup> Selanjutnya dalam rumusan perkawinan ini dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia itu adalah berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan

<sup>36</sup>Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan

<sup>37</sup>K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, h.14- 15

kepercayaan masing-masing, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang *plural* dan terdapat 6 agama yang ada di dalamnya dan legal dianut oleh penduduknya.<sup>38</sup>

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha esa seperti yang terdapat pada sila pertama Pancasila adalah karena perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian manusia yang dalam hal ini memiliki unsur batin dan rohani.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Anjuran perkawinan telah tertera dalam Al-Quran selaku firman Allah:

### a. Al- Quran

#### 1) Q.S An-Nisa Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, h. 63

<sup>39</sup> Amiur, Muhammad Idris Ramulyo, *Asas- Asas Hukum Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995)h,43

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.77.

## 2) Q.S Al- Qiyamah Ayat 39

جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾

Artinya: lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.<sup>41</sup>

## 3) Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>42</sup>

## b. Hadist

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي  
مِنِّي

Artinya: Nabi Saw Bersabda “Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yng tidak menyukai sunahku ia tidak termasuk golonganku”<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.580

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.352

<sup>43</sup> Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya:Al-Miftah, tt.),h 42.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).<sup>44</sup>

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)<sup>45</sup>

#### c. Hukum Positif Indonesia

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Pada pasal 2 ayat (1) yang dimaksudkan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan

<sup>44</sup>Firman arifandi, *serial hadist pernikahan 1: anjuran menikah dan mencari pasangan*,(jakarta : Rumah Fiqh Publishing.2018),h.12

<sup>45</sup>Ibdi.h, 13

atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>46</sup> Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai, karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.<sup>47</sup>

Adapun asas-asas yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Kesepakatan terdapat dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 1974 yaitu harus ada kesepakatan antara calon suami dan isteri.

---

<sup>46</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*, Jurnal Al-Adl Volume VII, 2015, h. 11

<sup>47</sup> Ibid. h. 25



- 2) Asas Monogami terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan wanita hanya boleh memiliki satu suami namun ada pengecualian pada Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 UU No.1 Tahun 1974.
- 3) Perkawinan bukan semata ikatan lahir melainkan juga ikatan batiniah
- 4) Kebiasaan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 1945 pada pasal 2 UU No.1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri
- 6) Perkawinan mempunyai akibat pada anak dan keturunan yang berasal dari perkawinan tersebut.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Asas- Asas Perkawinan <http://ngobrolonhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 April 2021

### 3. Tujuan Perkawinan

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi yang melaksanakannya, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
- b. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Selanjutnya naluri kebakapan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d. Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat

---

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), h.21

bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan

#### 4. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga<sup>50</sup>

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

##### a. Syarat Calon Suami

- 1) Islam
- 2) Laki-laki Baligh dan Berakal
- 3) Bukan Mahram bagi Calon Isteri

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h.59.

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h. 105

b. Syarat Calon Isteri

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berkal
- 4) Bukan Perempuan Mahram Bagi Calon Suami
- 5) Tidak dalam masa *Iddah*
- 6) Bukan Istri Orang

c. Syarat Wali

- 1) Islam
- 2) Bukan Kafir atau Murtad
- 3) Balaigh
- 4) Dengan Kerelaan Bukan Paksaan
- 5) Tidak Fasik
- 6) Tidak Cacat Akal dan Pikitan
- 7) Merdeka

d. Syarat Saksi

- 1) Berjumlah Minimal 2 Orang
- 2) Islam
- 3) Berakal dan Baligh
- 4) Laki- laki
- 5) Memahami Lafadz Ijab dan Qobul
- 6) Dapat Melihat Mendengar dan Bercakap
- 7) Adil dan Merdeka

Saksi adalah seseorang yang harus sehat secara jasmani dan rohani namun jika Saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>52</sup> Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>53</sup>

e. Syarat Ijab

- 1) Pernikahan itu Hendaklah Tepat
- 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- 3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- 4) Tidak terikat dengan tempo waktu seperti nikah mut'ah
- 5) Tidak dikatakan taklit

f. Syarat Kabul

- 1) Ucapan Mestilah seperti ucapan ijab
- 2) Tidak berkata sindiran
- 3) Dilafalkan oleh calon suami
- 4) Tidak dikatakan dengan jangka waktu seperti nikah mut'ah
- 5) Tidak dikatakan taklit
- 6) Menyebut nama calon isteri
- 7) Tiada diselangi oleh perkataan lain

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000),h. 90.

<sup>53</sup>M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002),h 71.



Keabsahan perkawinan yang ada dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan “ berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 maka norma agama lah yang menentukan keabsahan perkawinan.

Kemudian dalam pasal (2) UU No. 1 Tahun 1974 menambahkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali dimuat di dalam peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan menyatakan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, kemudian pemberitahuan tersebut terdapat dalam ayat (1) dilakukan sekurang- kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan dan pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan oleh suatu alasan yang penting diberikan oleh camat ke kepala daerah.

Pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur oleh satu ayat, namun

sebenarnya masalah pencatatan ini masih sangatlah dominan, ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sebagian pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.<sup>54</sup>

#### 4. Rukun Perkawinan

Adapun rukun berkawinan terdiri dari beberapa yaitu :

##### a. Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

##### b. Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.<sup>55</sup>

##### c. Wali

Wali adalah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali

<sup>54</sup>Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Taringab, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 289

<sup>55</sup>Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), h. 87.

*aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).<sup>56</sup> Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

*Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).*

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid. Imam Syafi'i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan

---

<sup>56</sup>Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, Sunan Abu Daud, (Bairut : Dar al Kutub, Juz IV) , h.270.

seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.” Demikian pula menurut *al-Qurtubi*, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.<sup>57</sup> Apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab inidigolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> M. Bagir, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), h 68.

<sup>58</sup> M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), h.13.

e. Dua Orang Saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.<sup>59</sup>

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap

---

<sup>59</sup>Slamet Abidin, Fiqih, Juz I, h.101.

sah.<sup>60</sup> Kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya.

f. Sighat Ijab dan Kabul

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan katakata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami). Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan *lafadz fi'il madi* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il madi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang)

---

<sup>60</sup>*Ibid*,h. 99.



## B. Klasifikasi Mandi dalam Islam

### 1. Pengertian Mandi

Menurut bahasa yaitu *al-ghasl* atau *al-ghusl* ( الغسل-الغسل ) yang berartimengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambutsampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkinuntuk menghilangkan hadats besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadats besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mandi secara mutlak, dan Dia tidak menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya (yaknin Allah SWT tidak menyebutkan urutan-urutan yang harus dilakukan saat mandi). Apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah Subhanahuwa Ta'ala lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi. Dan, tidak ada waktu khusus untuk mandi.<sup>61</sup>

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan. Mandi artinya mengalirkan air keseluruh badang dengan niat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 58

<sup>62</sup>Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2012, h. 34

Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>63</sup>

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat an-Nisaa' ayat 43 berikut ini;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.106

*yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*<sup>64</sup>

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihiwasallam berkata kepada Abu Dzarr, "Apabila engkau memperoleh air, makabasuhkanlah air itu ke kulitmu. Dan Abu Dzarr tidak menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan kadar air itu kepadanya selain dengan mengusap atau membasuh kulit. Imam Syafi'i berkata: Saya lebih menyukai seseorang menggosok tubuhnya sesuai dengan kemampuannya ketika mandi. Namun apabila ia tidak mengerjakan hal itu dan air telah merata pada kulitnya, maka hal itu sudah cukup baginya.

## 2. Syarat Sah Mandi

- a. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudu juga berlaku padasahnya mandi, kecuali muwalat. Begitu juga, tidak perlu menyiram badandari atas ke bawah.
- b. Orang yang berkewajiban beberapa mandi bisa melakukan satu mandi sajadengan beberapa niat mandi wajib
- c. Seseorang yang telah melaksanakan mandi janabah; jika hendak menunaikan salat, maka dia tidak perlu berwudu. Akan tetapi

---

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),h.75

pada selain mandi janabah, maka untuk menunaikan salat dia harus berwudu terlebih dahulu.<sup>65</sup>

- d. Dalam mandi irtimasi, seluruh badan harus suci. Akan tetapi dalam manditartibi, seluruh badan tidak harus suci. Dan jika setiap bagian dari badanyang hendak dibasuh itu disucikan terlebih dahulu, maka demikian ini sudah cukup
- e. Mandi jabiroh seperti wudu jabiroh, hanya saja berdasarkan ihtiyath wajib, mandi ini harus dilakukan secara tartibi.
- f. Orang yang sedang berpuasa wajib tidak boleh mandi irtimasi, karena orang yang berpuasa tidak boleh memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air. Akan tetapi, jika dia mandi irtimasi karena lupa, puasanya tetap sah.
- g. Dalam keadaan mandi, seluruh badan tidak perlu digosok dengan tangan, tetapi cukup hanya dengan niat mandi dan air sampai ke seluruh badan.<sup>66</sup>

### 3. Rukun Mandi

- a. Niat bagi orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja)
- b. Menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang haid atau nifas hendaklahia berniat menghilangkan hadar kotorannya
- c. Mengalirkan air keseluruh tubuh yang disunahkan dalam mandi:
  - 1) Membaca “*bismillah*” pada mula mandi
  - 2) Berwudhu sebelum mandi

<sup>65</sup>Ibid, h.21

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid. 1, h. 106

- 3) Menggosok seluruh badan dengan kedua telapak tangan
- 4) Mendahulukan tubuh bagian kanan dari pada tubuh bagian kanan
- 5) Berturut-turut.<sup>67</sup>

#### 4. Macam- Macam Mandi

##### a. Mandi Wajib

Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan seorang yang mukmin karena sebab-sebab tertentu, Sebab-sebab wajib mandi ada enam, tiga di antaranya biasa terjadi pada lakilaki dan perempuan, dan tiga lagi tertentu (khusus) pada perempuan saja:

- 1) Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak
- 2) Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.
- 3) Mati, Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid
- 4) Haid, Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandiagar ia dapat shalat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandiitu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali.<sup>68</sup>
- 5) Nifas. Yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan

---

<sup>67</sup>Ibid,h.22

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II, (Bairut: Dar al-Firk), 1994, h. 5

- 6) Perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.
- 7) Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran.

#### **b. Mandi Sunnah**

Mandi sunnah adalah mandi yang sah sholat tampanya. Syara' menghukumnya sunnah dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk mandi-mandi sunnah yaitu:

##### **1) Sunnah mandi hari Jumaat**

Sunnah mandi pada hari jum'at sebelum melaksanakan sholat jumaat, dan juga bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jumaat seperti orang musafir, perempuan dan anak-anak. Waktu mandi sunnah jumaat setelah azan subuh, dan yang lebih utama adalah sebelum berangkat melaksanakan sholat jum'at

##### **2) Sunnah mandi dua Hari Raya**

Sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat *'Idul Fitri* dan *'Idul Adha* bagi siapa saja yang hendak melakukan sholat hari raya atau yang tidak melakukan sholat juga disunnahkan untuk mandi.



### 3) Sunnah mandi Gerhana Matahari dan Bulan

Sebelum melakukan sholat gerhana matahari, atau gerhana bulan disunnahkan untuk mandi bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang tidak mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.<sup>69</sup>

### 4) Sunnah mandi minta hujan

Mandi sunnah ini dilakukan sama seperti mandi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan

### 5) Mandi karena memandikan mayat

Disunnahkan mandi bagi siapa saja yang memandikan mayat, setelah selesai memandikan mayat tersebut.<sup>70</sup>

### 6) Mandi orang gila apabila ia sembuh dari gila, karena ada sangkaan (kemungkinan) ia keluar mani.

### 7) Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dkk, al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001), Cet ke 1, h. 217

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, op.cit, h. 60

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II, (Bairut: Dar al-Firk), 1994, h. 57

## 5. Tata Cara Mandi

Dalam pelaksanaan mandi, seluruh badan dan kepala serta leher harus disiram, baik mandi wajib, seperti: mandi janabah, maupun mandi sunah, seperti mandi hari Jum'at. Dengan kata lain, dalam melaksanakan semua macam mandi, tidak ada perbedaan kecuali pada niat.

### a. Mandi Tartibi (secara berurutan)

- 1) Membasuh kepala dan leher
- 2) Diteruskan dengan membasuh badan bagian kanan
- 3) Kemudian membasuh badan bagian kiri

### b. Mandi Irtimasi

Dengan niat mandi, membenamkan diri secara sekaligus ke dalam air sehingga seluruh badan dan kepala berada di dalam air

- 1) Atau membenamkan diri secara bertahap ke dalam air, sampai pada akhirnya seluruh badan dan kepala berada di dalam air.
- 2) Atau masuk ke dalam air, kemudian menggerakkan badan dengan niat mandi.<sup>72</sup>

Mandi bisa dikerjakan dengan dua cara; tartibi dan irtimasi. Pada mandi tartibi, pertama-tama membasuh kepala dan leher, kemudian setengah badan bagian kanan, dan setelah itu setengah badan bagian kiri. Pada mandi irtimasi, seluruh badan dan

---

<sup>72</sup>*Ibid.h,23*

kepala berada di dalam air secara sekaligus. Oleh karena itu, untuk melakukan mandi irtimasi, diperlukan air yang cukup supaya bisa memasukkan seluruh badan dan kepala ke dalamnya.

## 6. Manfaat Mandi

Berdasarkan Kitab Fikih Manhaji, ada beberapa hikmah atau manfaat dengan disyariatkannya mandi bagi orang Islam. Adapun beberapa hikmah mandi tersebut yaitu :

- a. Memperoleh pahala : Mandi dalam pengertian syar'i merupakan ibadah karena di dalamnya ada penerapan perintah syara' dan pegamalan hukumnya. Di dalam mandi ada pahala besar, karena itu, Rasulullah SAW bersabda: "Kesucian setengah dari iman" (Diriwayatkan Muslim: 222), yaitu separuh atau bagian darinya, kesucian itu mencakup wudlu dan madi.
- b. Mendapatkan kebersihan : Ketika seorang muslim mandi, ia membersihkan kotoran yang mengenai tubuhnya, daki yang menempel, atau keringat yang menyebabkan bau.
- c. Membawa Kesegaran Badan : Mandi menyebabkan seseorang memperoleh kehidupan dan kesegaran. Hilanglah kelojoan, kelemahan, dan kemalasan, terlebih setelah adanya sebab-sebab yang mewajibkan, seperti bersetubuh.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Samidi, *konsep al-ghuslu dalam kitab manhaji*, Jurnal "Analisa" Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010.h,102

### C. *Al-Urf* dalam Konsep Islam

*Al-Urf* dalam konsep Islam ialah sebuah adat atau sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

Salah satu hal yang sangat riskan dalam Adat Istiadat yang berkembang di Indonesia adalah Masih melekatnya kepercayaan pada agama nenek moyang yakni animisme dan dinamisme sehingga adat menjadi hal yang cenderung padu terhadapnya, ini sama sekali tidak dibenarkan dalam konsep beragama Islam Karena termasuk dalam Katagori Syirik dimana pelakunya dijatuhi hukuman atau dosa yang sangat besar.

#### 1. Pengertian *Al-Urf*

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>74</sup>

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa "*Aladatu* "

---

<sup>74</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

(العادة) terambil dari kata “ *al audu*” العود dan “ *al muaawadatu* “ (المودة) ) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-’adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘*adah*’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.<sup>75</sup>

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *Al-’adat* itu sendiri adalah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-’adat* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.<sup>76</sup> Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan

---

<sup>75</sup>On-line <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html> diakses pada 20 f3buari 2021

<sup>76</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22.

sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.<sup>77</sup>

‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan serta hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.<sup>78</sup>

*Ushul fiqh*, yang dimaksud dengan ‘urf’ itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>79</sup>

Pandangan ulama, secara umum ‘urf’ atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan Al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf’ itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf’ itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf’ atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah

---

<sup>77</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

<sup>78</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

<sup>79</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165



sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama *syafi'iyah* banyak menggunakan '*urf*' dalam hal hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara*' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>80</sup>

'*Urf* jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. '*Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan : kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.<sup>81</sup>

## 2. Dasar Hukum *Al-Urf*

Kehujjahan '*urf*' ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak '*urf*' yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima '*urf*' yang shahih sebagai hujah syar'iiyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan '*urf*' dibandingkan

---

<sup>80</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80

<sup>81</sup>On-line <http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html> diakses pada tanggal 12 febuari 2021

dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, 'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>82</sup>

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam Q.S Al-a'raf (7) : 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>83</sup>

b. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>84</sup>

Mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas mengandung maksud yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai

<sup>82</sup>Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

<sup>83</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 255.

<sup>84</sup> Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 44

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al- 'urf*, yaitu:<sup>85</sup>

أَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:*

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينَ بِالنَّصِّ

*“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.*

Penetapan hukum berdasarkan *urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan *nash*. Kaidah ini banyak berlaku pada *urf-urf* khusus, seperti *urf* yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

<sup>85</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213.

### 3. Syarat-Syarat *Al-Urf*

Syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:<sup>86</sup>

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'andan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'a termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:<sup>87</sup>

- 1) '*urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: '*Urf*' di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*Urf*' semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْ  
فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

<sup>86</sup> A. Djazuli, Ilmu Fiqh : *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

<sup>87</sup> Satria Effendi,,, h. 156-157.

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>88</sup>*

- 2) 'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) 'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang ng dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro 2008),

boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*' antara lain yaitu:<sup>89</sup>

- 1) '*urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) '*urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) '*urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

#### 4. Macam-Macam Al-Urf

- a. '*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam '*urf*', sebagai berikut:<sup>90</sup>

##### 1) '*Urf fasid*

'*Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama

<sup>89</sup>A. Basiq Djalil,,,,, h.166

<sup>90</sup>Abdul Wahhab Khallaf, ,,, h. 134-13.



Islam bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

2) '*Urf khash* (khusus)

yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu ataunegeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

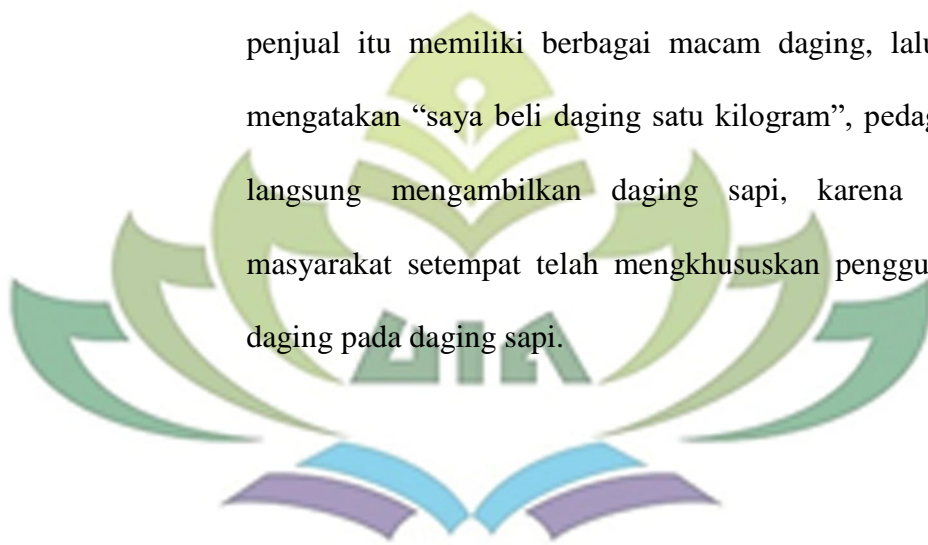
b. '*Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2,yaitu:<sup>91</sup>

- 1) '*Urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan *ijab qobul* saat melakukan serah-terima barang.

---

<sup>91</sup> On-line <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html> diakses pada tanggal 18 febuari 2021

- 2) *'urf* dalam bentuk perkataan (*Al-'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Begong suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005.
- Buvana Shalahin, *Kaidah Hukum Islam* ,Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasido, 2008.

Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat, Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan, 2002.

M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, Bandung : Trigenda Karya, 1996.

Mardani, Ushul Fiqh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad Khatib, Sunan Abu Dawud, Juz IV

Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, Sunan Abu Daud, (Bairut : Dar al Kutub, Juz IV

Nufian S Febriani, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press, 2018.

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

On-line <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html> diakses pada 20 febuari 2021

On-line <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html> diakses pada tanggal 18 febuari 2021

On-line <http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html> diakses pada tanggal 12 febuari 2021

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016, Jakarta: Kemdikbud RI, 2016.

- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016, Jakarta: Kemdikbud RI, 2016
- Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Samidi, *konsep al-ghuslu dalam kitab manhaji*, Jurnal “Analisa” Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 2000.
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h.9
- Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Susiadi AS, *Metodologi penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo, 2002.
- Wawancara dengan tokoh Adat, Hj. bahirum, di Desa Karta Raharja Pada tanggal 11 maret 2021.
- Wawancara dengan tokoh agama, Juanda, di Desa Karta Raharja Pada tanggal 11 maret 2021.

Wawancara dengan tokoh masyarakat,rohaya, di Desa Karta Raharja Pada tanggal 11 maret 2021.

Wawancara dengan tokoh masyarakat,rohaya, di Desa Karta Raharja Pada tanggal 11 maret 2021.

Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dkk, al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001.

